

RINGKASAN

Fazilah Febriana 207410102021 ANALISIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH TAKENGON NOMOR 112/Pdt.G/2023/MS.Tkn oleh MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH NOMOR 70/Pdt.G/2023/MS.Aceh TENTANG PERKARA CERAH GUGAT

(Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., Hum dan Dr. Herinawati, S.H., M.Hum)

Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi “Setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut”. Namun dalam perkara cerai gugat di Mahkamah Syar’iyah Takengon dengan register perkara Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Tkn Tergugat tidak dipanggil untuk menghadiri persidangan sehingga putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor Perkara 70/Pdt.G/2023/Ms.Aceh.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini yaitu semua data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa Putusan Mahkamah Syar’iyah Takengon Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Tkn secara formil putusan sudah memenuhi unsur filosofi, sosiologis dan yuridisnya akan tetapi tidak disebutkan di dalam putusan bahwa tidak memanggil Tergugat di dalam sidang pembacaan putusan. Dalam persidangan tingkat banding Nomor 70/Pdt.G/2023/MS.Aceh dilakukan pemeriksaan kembali berkas persidangan yang pada faktanya tidak memanggil Terbanding pada pembacaan putusan mengakibatkan persidangan yang dilaksanakan batal dan tidak sah, sehingga putusan Mahkamah Syar’iyah Takengon Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Tkn dibatalkan oleh hakim tingkat banding yang menurut penulis memenuhi unsur sosiologis para pihak. Akibat hukum pembatalan putusan cerai gugat Nomor 70/Pdt.G/2023/MS.Aceh Oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Terhadap Putusan Pada Tingkat Pertama, maka putusan pengadilan tingkat pertama sudah tidak mempunyai daya ikat dan daya laku lagi terhadap suami istri yang bersangkutan, sehingga Penggugat dan Tergugat tetap sah sebagai suami istri.

Disarankan kepada Kepada hakim Mahkamah Syar’iyah dalam memberikan pertimbangan untuk mengabulkan cerai gugat perlunya memperhatikan prinsip filosofi menggunakan ketentuan mashlahah agar keputusan cerai gugat memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi para pihak dan khususnya bagi Hakim Mahkamah Syar’iyah Takengon agar lebih efektif lagi dalam hal menjalankan praktik beracara sesuai tatanan beracara yang telah di atur di dalam Undang-Undang Hukum Acara Peradilan Agama.

Kata Kunci : Analisis, Pembatalan Putusan, Cerai Gugat

ABSTRACT

Fazilah Febriana 207410102021 **ANALYSIS OF THE CANCELLATION OF THE DECISION OF THE TAKENGON SYAR'YAH COURT NUMBER 112/Pdt.G/2023/MS.Tkn by THE ACEH SYAR'YAH COURT NUMBER 70/Pdt.G/2023/MS.Aceh CONCERNING DIVORCE CASES**

(Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., Hum dan Dr. Herinawati, S.H., M.Hum)

Article 26 paragraph (1) of Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, states "Every time a court hearing is held to examine a divorce suit, both the plaintiff and the defendant or their attorneys will be summoned to attend the hearing". However, in the divorce case at the Takengon Sharia Court with case register Number 112/Pdt.G/2023/MS.Tkn the defendant was not summoned to attend the trial so that the decision was canceled by the Aceh Sharia Court Case Number 70/Pdt.G/2023/Ms.Aceh.

This research is a normative legal research. The data sources in this study are secondary data sources through literature studies and documentation studies. Data analysis in this study is that all data obtained are then systematically arranged and analyzed qualitatively.

The results of this study found that the Decision of the Takengon Sharia Court Number 112/Pdt.G/2023/MS.Tkn formally fulfilled the philosophical, sociological and legal elements, but it was not stated in the decision that it did not summon the Defendant in the verdict reading session. In the appeal trial Number 70/Pdt.G/2023/MS.Aceh, a re-examination of the trial files was carried out which in fact did not summon the Respondent in the verdict reading, resulting in the trial being carried out being null and void, so that the Decision of the Takengon Sharia Court Number 112/Pdt.G/2023/MS.Tkn was canceled by the appellate judge which according to the author fulfilled the sociological elements of the parties. As a result of the legal annulment of the divorce decision lawsuit Number 70/Pdt.G/2023/MS.Aceh by the Panel of Judges at the Appellate Level Against the Decision at the First Level, the decision of the first level court no longer has binding force and enforceability against the husband and wife concerned, so that the Plaintiff and Defendant remain legally husband and wife.

It is recommended that the judges of the Sharia Court in providing considerations for granting a divorce petition need to pay attention to the philosophical principle of using the provisions of *mashlahah* so that the decision to divorce petition provides justice, benefits, and legal certainty for the parties and especially for the Judges of the Takengon Sharia Court to be more effective in carrying out procedural practices in accordance with the procedural order that has been regulated in the Law on Religious Court Procedure.

Keywords: Analysis, Cancellation of Decision, Divorce Lawsuit